

Judul : Pemerintah akan rombak total buku pelajaran SD sampai SMA, perlukah?
Tanggal : Minggu, 16 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Akan Rombak Total Buku Pelajaran SD Sampai SMA, Perlukah?

Pemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Wacana ini pun menuai polemik di masyarakat. Rencana perombakan tersebut digulirkan setelah Presiden melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah, melihat langsung buku yang digunakan para siswa, serta membandingkannya dengan standar buku pelajaran di negara tetangga. Menurutnya, kualitasnya kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, ide pembaruan ini berawal dari peninjauan langsung Presiden Prabowo ke sekolah-sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengecek satu per satu kondisi fisik buku pelajaran yang digunakan para siswa. "Saat mengecek buku pelajaran, beliau melihatnya satu per satu, lalu mendapati ada bahan buku yang sudah rusak, bahkan sebagian sudah dalam keadaan rusak," ujar Teddy, Jumat (7/8/2026). Selain masalah ketahanan bahan,

Presiden Prabowo menilai ukuran huruf dalam buku pelajaran saat ini relatif terlalu kecil. Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman dan berpotensi membuat mata siswa cepat lelah saat membaca. Sejauh ini, ukuran font dalam buku pelajaran berkisar 11-12 poin. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menjelaskan bahwa Pemerintah ingin menghadirkan buku ajar dengan tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih sesuai, serta kualitas kertas yang lebih kokoh agar dapat digunakan

dalam jangka panjang. "Tampilannya ingin dibuat lebih besar, menarik, dan tulisannya tidak kecil-kecil. Bahannya juga memang yang bagus supaya bisa bertahan lama. Dulu kan ada tradisi buku cetak tidak dimiliki pribadi secara permanen, tetapi bisa diwariskan atau digunakan kembali oleh adik kelasnya," jelas Prasetyo. Rencana tersebut menuai polemik di masyarakat. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, tidak mempermasalahkan rencana perombakan buku pelajaran.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah buku yang materinya maupun penyajiannya tidak sesuai dengan usia anak. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritik rencana tersebut. Menurut dia, persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukanlah kekurangan buku baru. Lantas, bagaimana pandangan Hetifah Sjaifudian dan Ubaid Matraji mengenai rencana perombakan total buku pelajaran tersebut? Berikut wawancaranya.

HETIFAH SJAIFUDIAN, Ketua Komisi X DPR

Setuju, Karena Isinya Tak Sesuai Usia Anak



Bagaimana pandangan Anda mengenai rencana perombakan buku ajar dari SD hingga SMA?
Kita lihat mana yang paling bermasalah. Misalnya, secara kontennya kurang bisa dipertahankan atau tidak sesuai dengan usia anak. Kemudian, juga tidak sesuai dengan kondisi perubahan zaman.

Apa contohnya?
Misalnya, sekarang penggunaan dan lain lain mungkin terlalu kecil isinya. Memang harus dilakukan pembaruan. Tetapi sekarang kita juga sudah bisa menggunakan, seperti, ada papan tulis digital. Kan berarti sebenarnya tidak harus bukunya dicetak juga. Kan. Bisa berupa buku digital, digunakan langsung, cepat begitu.

Pemerintah ber alasan mengganti buku ajar karena hurufnya perlu diperbesar?

Diperbesar hurufnya, it's okay. Tapi bukan berarti nanti menjadi proyek pengadaan buku. Bukan itu.

Berarti harus sesuai kebutuhannya juga, ya, Bu?
Iya, sesuai kebutuhan, bertahap. Bertahap mana yang memang paling bermasalah diganti. Misalnya, tadi isinya sudah tidak relevan.

Atau salah, harus diperbaiki. Itu tidak apa apa. Dan juga tadi kembali bahwa kita pun, anak anak sekarang sudah terbiasa belajar dengan menggunakan basis digital.

Jadi jangan berpikir langsung, ini semua buku berarti akan ada proyek pencetakan buku. Apalagi kalau terburu buru, nanti belum tentu isi penggantian lebih baik. Itu harus ada tim yang betul, betul, expert menilai dan sekaligus membuat konten yang barunya.

Tapi ada beberapa alasan, misalnya

“
Jadi jangan berpikir langsung, ini semua buku berarti akan ada proyek pencetakan buku. Apalagi kalau terburu buru, belum tentu isinya lebih baik.”

untuk mengganti buku baru ini karena tulisannya terlalu kecil. Bagaimana menurut Anda? Apakah logis?

Jadi betul betul dilihat, tidak semuanya. Karena banyak juga sekarang buku buku yang cukup bagus.

Kita lihat mana persisnya yang memang untuk anak anak usia dini atau SD, kelas kelas awal, begitu ya.

Jadi kalau memang betul ditemukan dan saya percaya itu akan berpengaruh, tentu tidak masalah. Kita selalu juga kok melakukan perbaikan begitu. Tapi prinsip prinsipnya lagi.

Jangan terus diterjemahkan, oh berarti semua buku langsung diganti. Apalagi kalau harus orang tua membayar, ya. Itu kan sesuatu yang akan memberatkan.

Bagaimana teknisnya?

Nanti teknisnya akan dibahas ketika rapat. Mungkin kita akan tanyakan kepada Pemerintah apa teknisnya. ■ REN

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Kebijakan Ini Berpotensi Pemborosan Anggaran



“
Persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.”

Bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana Pemerintah yang akan mengganti buku ajar dari SD hingga SMA?

Rencana memperbaiki dan mengganti ulang buku pelajaran tingkat SD hingga SMA jangan sampai kembali terjebak menjadi proyek penggantian buku secara besar besaran.

Pergantian pemerintahan tidak semestinya selalu diikuti penggantian buku pelajaran, sementara persoalan mendasar kualitas pendidikan justru tidak kunjung terselesaikan.

Persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.

Apakah menurut Anda buku ajar memang tidak perlu diganti?
Buku ajar memang harus terus dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan isi buku sesuai

perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi ataupun bias.

Namun, Pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.

Apa risiko yang Anda khawatirkan dari rencana penggantian buku tersebut?

JPPI juga mengkhawatirkan adanya risiko pemborosan anggaran apabila evaluasi buku langsung diterjemahkan menjadi pencetakan ulang jutaan eksemplar buku di seluruh Indonesia. Sebelum memutuskan mengganti buku, Pemerintah seharusnya melakukan audit secara menyeluruh terhadap buku buku yang saat ini digunakan. Audit harus mampu menjawab se

cara jelas buku mana yang memang sudah tidak layak, buku mana yang hanya membutuhkan revisi sebagian, dan buku mana yang masih dapat digunakan.

Jangan semua persoalan buku di jawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan.

Bagaimana seharusnya kebijakan buku ajar dilakukan agar tidak bergantungan pada pergantian pemerintahan?

JPPI menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Presiden dan menteri boleh berganti, tetapi sistem pendidikan tidak semestinya selalu dimulai kembali dari nol. ■ REN